



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

TAHUN



DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2020

Pengarah:

Plt.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penulis:

Prasetyo Hadi

Dewi Yuliana Lestari

Vitya Rani Hapsari

Pengolah Data:

Eni Eryani

Nurjiyanto

Diterbitkan oleh:

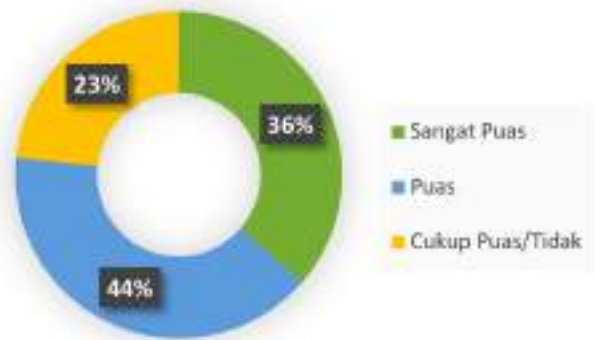
Bagian Perencanaan Progam & Pelaporan Setditjen Informasi
dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

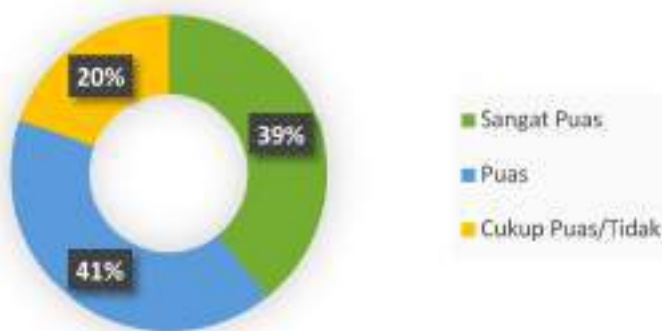
Tahun 2021

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2020 menyajikan berbagai upaya dan hasilnya pada Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran program. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum telah dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih belum tercapai.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi yang Didapatkan (rata-rata 76%)



Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi yang Didapatkan (rata-rata 80%)



Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sebagai turunan utama.

Laporan kinerja juga akan menggambarkan terhadap kontribusi pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo terkait Reformasi RB, Akuntabilitas Kinerja, serta Kinerja Anggaran. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh adanya komitmen serta peran aktif dari segenap komponen sivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik serta lembaga-lembaga terkait. Uraian perihal capaian dari sasaran program akan lebih detail digambarkan pada Bab III.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa,akhirnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-



Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. LAKIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN periode 1 tahun berjalan. Laporan disusun berdasarkan sasaran kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategik (Renstra) yang lebih tinggi yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika. Manfaat dari Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras dan Kerjasama segenap jajaran Ditjen IKP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diturunkan dari NAWACITA. Maka untuk selanjutnya diharapkan semakin banyak kegiatan di lingkungan Ditjen IKP yang lebih terukur dan lebih tajam outcomenya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kami berharap agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dan mewakili atas penilaian kinerja Ditjen IKP Tahun 2019. Meskipun di awal tahun 2021 telah terjadi mutasi jabatan pratama di lingkungan Kemkominfo, saya yang juga sebagai Sekretaris Jenderal menerima estafet kepemimpinan selaku Plt.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pimpinan dan jajaran Ditjen IKP yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban selama tahun 2020, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2021

Plt.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Mira Tayyiba

IKHTISAR EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I	9
Pendahuluan	9
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
BAB III	23
AKUNTABILITAS	23
A. Capaian Unit Kerja Eselon I	23
B. Capaian Unit Kerja Eselon II	33
BAB IV	55
Referensi	57
LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	



Sertijab Direktur Jenderal Informasi Publik dari Bapak Prof.Dr.Widodo Muktiyo Kepada Ibu Mira Tayyiba, Senin (08/03/2021).

PENDAHULUAN

Dinamika pemanfaatan media serta teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat dan pemerintah dalam mengakses berbagai informasi ataupun pada aspek berkomunikasi. Kondisi itu memerlukan penyesuaian dalam pelayanan informasi dan komunikasi pemerintahan agar cita-cita membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Hal ini memang merupakan amanah dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara terkait segala informasi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik serta proses dan alasan kebijakan pemerintah. Artinya, komunikasi pemerintah harus dilakukan dalam rangka membangun citra tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya, sebagai upaya mendapatkan kepercayaan publik. Agar dapat menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024 melanjutkan kebijakan sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan Government Public Relations (GPR).

Government Public Relations (GPR) merupakan program yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut dijelaskan bahwa untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden menginstruksikan Kementerian dan Lembaga negara untuk:

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Khusus untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan tugas khusus sebagai koordinator pengelolaan komunikasi publik yang berperan untuk :

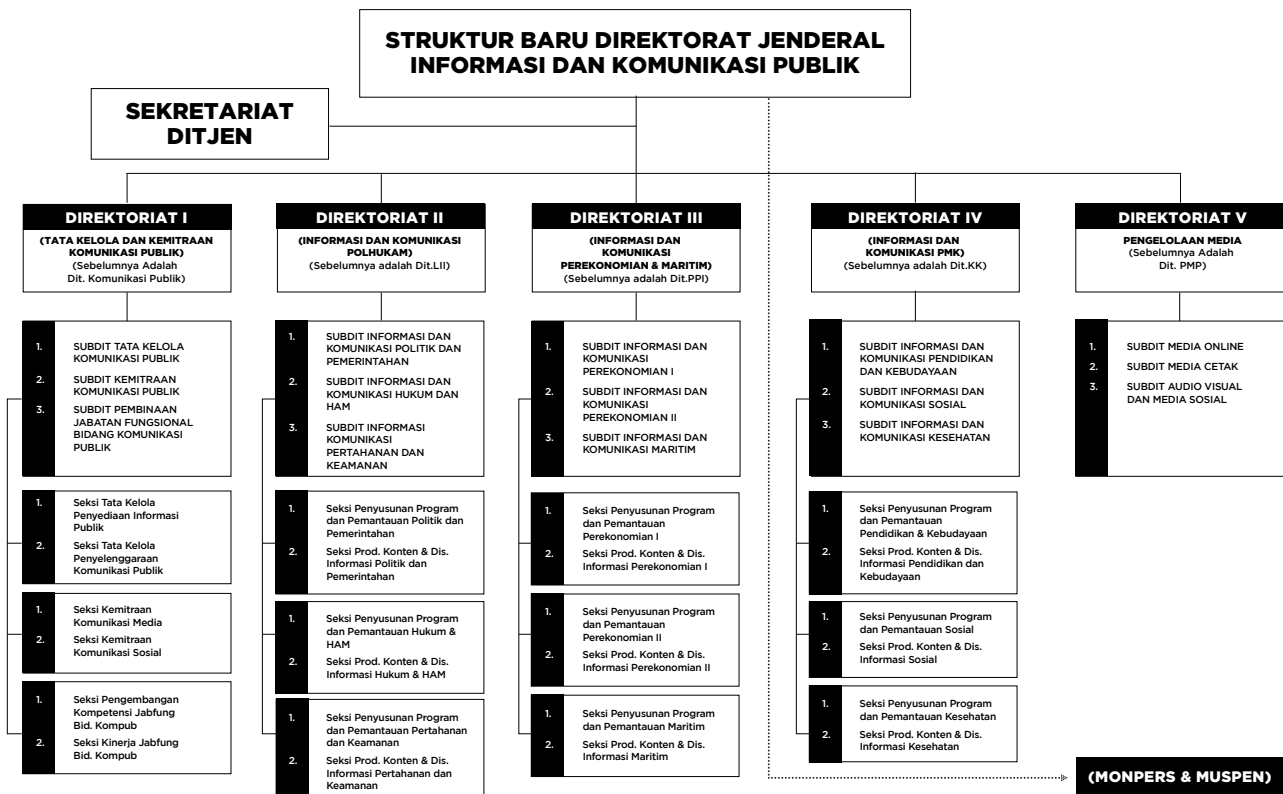
1. mengoordinasikan perencanaan, penyiaran, dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
2. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Dengan tugas Kemkominfo sebagai koordinator pengelola komunikasi publik agar konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dapat terintegrasi dalam satu “frame” melalui narasi tunggal yang menggunakan data dan sudut pandang komunikasi yang sama, dan secara kelembagaan dapat mensinergikan informasi di pemerintah secara horizontal dan vertikal, serta dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan kebijakan secara sinergis.

Sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 tersebut, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) memiliki peran terkait pengelolaan diseminasi, edukasi/literasi, klarifikasi, dan menyusun kontranarasi isu terkait kebijakan dan program pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam dokumen Rencana Strategis 2020- 2024 menetapkan strategi melalui program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik. Pada tahun 2020 ini fokus yang menjadi acuan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target strategis tersebut adalah adanya

peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah. Koridor yang dijadikan acuan mengacu langsung pada sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika yakni pada peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

A. Struktur Organisasi



Gambar 1.Struktur Organisasi Ditjen IKP

B. Kedudukan dan Fungsi

Sesuai dengan Permenkominfo No 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP memiliki fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
- 4) peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- 5) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi disetiap bidang tugas dan tanggung jawabnya. Total ada 274 pegawai berstatus ASN yang bertugas melaksanakan roda organisasi pada tahun 2020.

No.	Unit Kerja	Jabatan							Jumlah
		Pimpinan Tinggi		Administrasi			Fungsional		
		I	II	III	IV	Pelaksana	Ahli	Terampil	
1.	Direktorat Jenderal IKP	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat Ditjen IKP	-	1			32	14	-	47

3.	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	-	-			19	19	-	38
4.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam	-	1			18	12	-	31
5.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	-	1			25	14	2	42
6.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	1			23	12	-	36
7.	Direktorat Pengelolaan Media	-	-			22	12	0	36
8.	UPT Museum Penerangan TMII	-	-	1	1	13	6	-	21
9.	UPT Monumen Pers-Surakarta	-	-	1	1	13	6	1	21
Jumlah		1	4	2	2	165	95	5	274

Tabel 1. SDM Ditjen IKP berdasarkan Jabatan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
1	Direktur Jenderal IKP	1	1		
2	Setditjen IKP	47	1	14	32
3	Dit. Tata Kelola dan Kemitraan KP	38	0	19	19
4	Dit. Informasi & Komunikasi Polhukam	31	1	12	18
5	Dit. Informasi & Komunikasi Perekonomian dan Maritim	42	1	16	25
6	Dit. Informasi dan Komunikasi PMK	36	1	12	23
7	Dit. Pengelolaan Media	36	0	14	22
8	Museum Penerangan	21	2	6	13
9	Monumen Pers Nasional Surakarta	22	2	7	13
Jumlah		274	8	100	165

Tabel 2. Jumlah SDM berdasarkan unit kerja di Lingkungan Ditjen IKP

C. Peyederhanaan Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal IKP pada tahun 2020 melaksanakan peyetaraan jabatan yang dilakukan kepada 58 orang pejabat administrator dan pengawas. Adapun implikasi dari penyetaraan tersebut adalah berubahnya status para pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional.

Pejabat Administrator dan Pengawas yang disetarakan menjadi pejabat Fungsional berdasarkan Satuan Kerja terdiri dari :

No.	Jabatan Fungsional Penyetaraan	Jumlah
1.	a.Pranata Humas Ahli Madya	12 org
	b.Pranata Humas Ahli Muda	24 org
2.	Arsiparis Ahli Muda	3 org
3.	a.Analis Kepegawaian Ahli Madya	1 org
	b.Analis Kepegawaian Ahli Muda	1 org
4.	Perencana Ahli Muda	3 org
5.	a.Analis Kebijakan Ahli Madya	1 org
	b.Analis Kebijakan Ahli Muda	2 org
6.	Analisis Hukum Ahli Madya	1 org
7.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	1 org
8.	a.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1 org

Tabel 3. Jumlah Penyetaraan Jabatan 2020

Pejabat fungsional jenjang Madya dan Muda yang telah dilantik dari hasil penyetaraan jabatan berdasarkan jenis Jabatan Fungsional yaitu:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Pejabat
1.	Sekretariat Ditjen	12 org
2.	Dit. Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	10 org
3.	Dit. Informasi dan Komunikasi Polhukam	9 org
4.	Dit. Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	9 org
5.	Dit. Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10 org
6.	Dit. Pengelolaan Media	4 org
7.	Museum Penerangan	2 org
8.	Monumen Pers Nasional	2 org
	Jumlah	58 org

	b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	6 org
8.	Pustakawan Ahli Muda	2 org
	Jumlah	58 org

Tabel 4. Jumlah Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan 2020

Dalam hal tugas dan fungsi organisasi para pejabat fungsional tetap menjalankan peranannya sebagai Koordinator dan Subkoordinator jabatan struktural sebelumnya sesuai dengan SK Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 9 Tahun 2021.

LAPORAN KINERJA

TAHUN

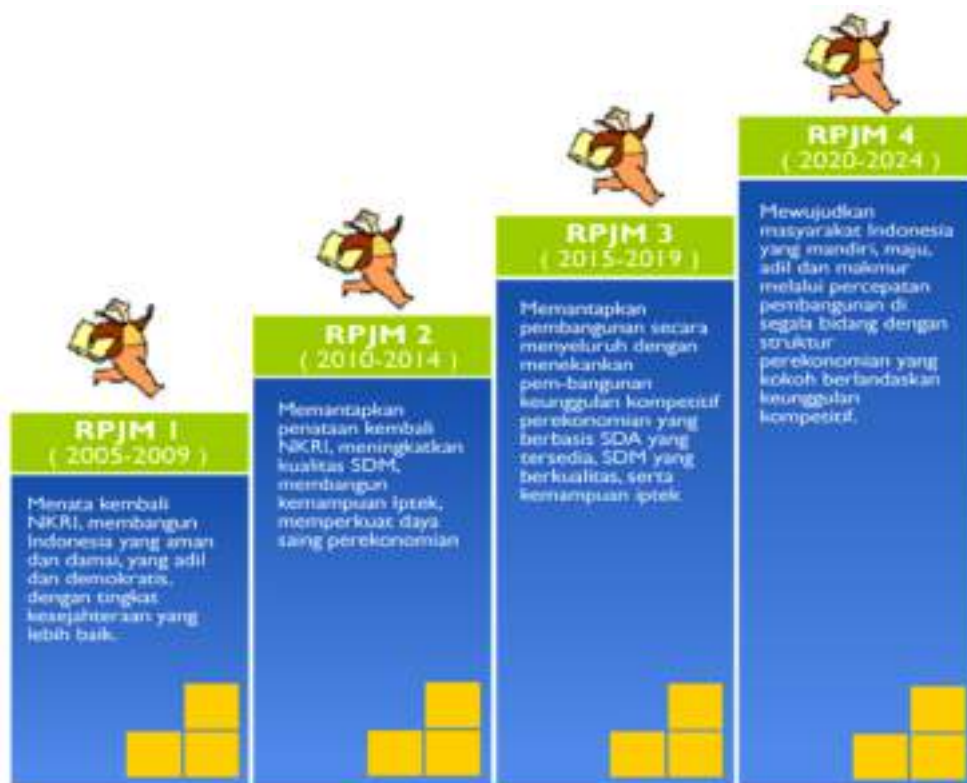


DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PERENCANAAN KINERJA

Dalam hal mencapai target yang menjadi sasaran atas tugas dan fungsi yang diemban oleh Ditjen IKP, maka dibuatlah sistem perencanaan yang diharapkan dapat menjadi acuan guna mencapai hal yang diharapkan. Rencana yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tidak terlepas dari sasaran yang dijadikan target oleh pemerintah.

Mengacu kepada UU No 17. Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.



Gambar 2. Skema RPJPN 2005-2025

Sumber : Bappenas

Perencanaan jangka panjang tersebut merupakan acuan yang menjadi basis arah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo pada 2020-2024. Kontribusi yang dilakukan oleh Ditjen IKP dalam mendukung tercapaian sasaran strategis tersebut ialah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Strategis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik 						
SS.09	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					
IKSS.01	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif)	71	72	73	74	75

Tabel 5. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX

Sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah menjadi kewajiban pemerintah

sebagai yang diberi amanat rakyat sebagai pelaksana pembangunan untuk senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Pemerintah pun dengan mudah mengkomunikasikan kebijakannya agar dapat terlaksana dengan baik dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik lewat keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik pada akhirnya menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik telah terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Secara singkat Kemkominfo bertindak sebagai dirigen humas pemerintah (Government Public Relation) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah.



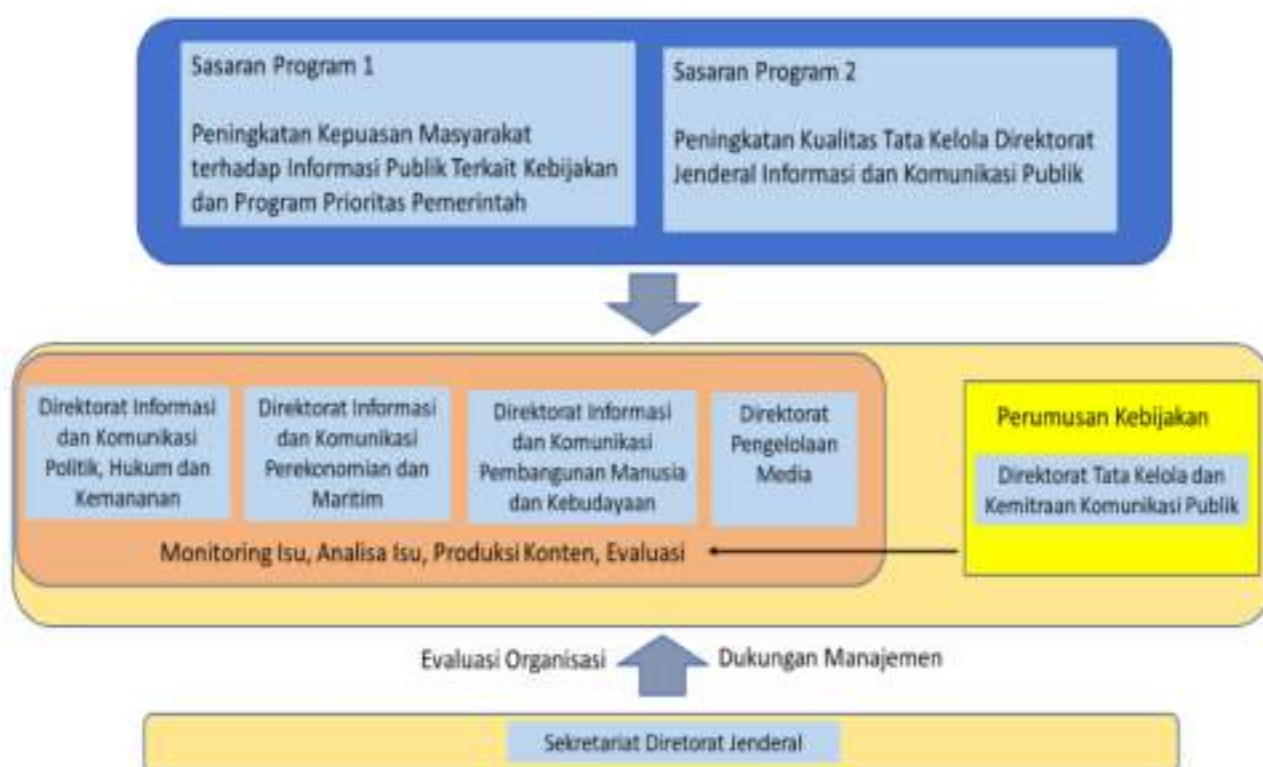
Gambar 3. Alur Kerja Government Public Relation

Dalam menjalankan fungsi Government Public Relation Kemkominfo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik selama tahun 2020 telah melaksanakan diseminasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik below the line, through the line dan above the line. Selain itu Ditjen IKP dalam melaksanakan diseminasi informasi juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, Lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya. Selama tahun 2020 Ditjen IKP telah melaksanakan kegiatan diseminasi sebanyak sebagai berikut:

Program	Target Jangkauan	Capaian Jangkauan	%	Keterangan
Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektor				
Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM	19.001.500	99.764.457	525%	Wawasan Kebangsaan, Deradikalisasi, Pembangunan Papua &
				Papua Barat, Omnibus-Law.
Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim	40.613.500	72.158.677	177%	Transformasi Digital, Ekonomi Digital, Literasi Keuangan, Program PEN, Omnibus Law
Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:	72.270.000	97.527.627	134%	Pencegahan <i>Stunting</i> , Program Bansos, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Total	131.885.000	269.450.761	204%	

Tabel 6. Volume Kegiatan Sosialisasi Ditjen IKP 2020

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini pun menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diukur dengan melihat akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Pengukuran tahun 2020 dilaksanakan melalui survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. Ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.



Gambar 4. Proses Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

LAPORAN KINERJA

TAHUN



DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

AKUNTABILITAS

A. Capaian Unit Kerja Eselon I

Dalam rangka mengetahui keberhasilan capaian dan kegagalan atas pelaksanaan target organisasi perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur guna dapat dijadikan acuan pada periode selanjutnya. Pengukuran dilihat dari capaian hasil dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, acuan yang dijadikan sebagai target merupakan dokumen perjanjian kinerja yang didalamnya memuat sasaran program dan indikator kinerja program dalam satu tahun.

Indikator kinerja sebagai alat ukur dari keberhasilan sasaran program bersifat kuantitatif/kualitatif agar dapat menggambarkan tingkat pencapaian melalui metodologi yang dapat diukur. Di tahun 2020, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 2 (dua) sasaran program yang mendukung rencana strategis dari Kementerian Kominfo. Pertama ialah, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait dengan kebijakan dan program prioritas nasional. Sasaran program tersebut ialah

- 1) Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dengan target >70% dan;
- 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam mengukur ketercapaian kinerja pada sasaran program pertama ini digunakan alat ukur yakni survei publik. Sasaran program pertama dapat tergambar melalui adanya survei yang dilakukan kepada masyarakat.

Sementara itu sasaran program kedua yakni peningkatan kualitas tata kelola Ditjen IKP merupakan sasaran generic yang ditetapkan bersama dalam rangka mendukung akuntabilitas organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang capaian targetnya diukur melalui instrumen-instrumen yang telah ada.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%
		2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%
		3. Jumlah Masyarakat Yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah.	70% Jumlah Penduduk Usia Produktif (120 Juta Jiwa)
2	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP	76,5 (skala)
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP	67 (Skala)
		3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen IKP Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen.	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%
		4. Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen IKP Tahun 2020 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen.	1 %
		5. Nilai Persepsi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen IKP	3,5 (skala)

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Ditjen IKP TA 2020

Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik ini yang juga menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Pengukuran tahun 2020 dilaksanakan melalui survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. Ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.



Gambar 5. Ruang Lingkup Survey Persepsi Publik

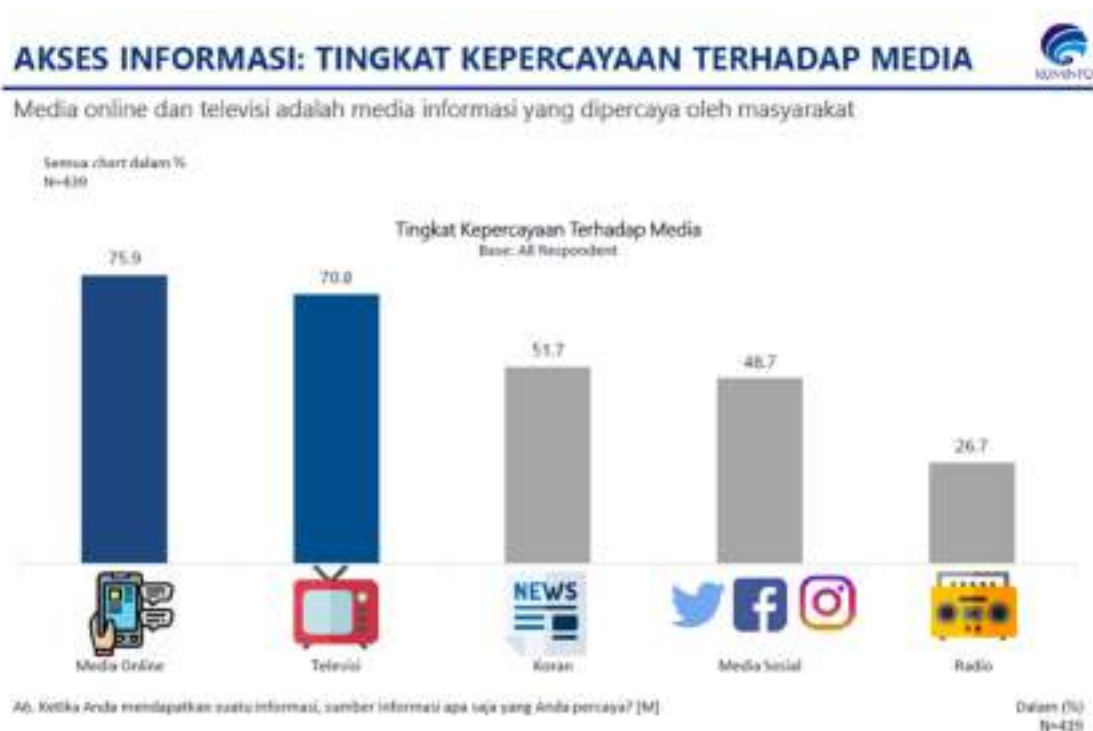
Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari hasil focus group discussion dengan beberapa stakeholder yang merupakan irisan dari informasi program pemerintah yang di diseminasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) dan juga termasuk dalam prioritas nasional, yaitu:

1. Pilkada Serentak 2020;
2. Penanganan Pandemi COVID-19;
3. Pencegahan Stunting/Kerdil;
4. Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Wawasan Kebangsaan/Pendidikan Karakter Pancasila;
6. Ekonomi Digital;
7. Gerakan Indonesia Bersih

Jumlah sampling sebanyak 439 panel Markplus.Inc di 13 Kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penetapan sampling berdasarkan teori Central Limit Theorem dimana distribusi sampling mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel mencukupi ($n \geq 30$ responden), maka distribusi sampel dapat dianggap memenuhi distribusi normal.

Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan.

Untuk dimensi kepuasan masyarakat, penelitian ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut. Pertama adalah mayoritas responden setuju bahwa mereka mudah dalam menjangkau informasi. 83% responden mengakses informasi melalui media komunikasi interpersonal (SMS, Aplikasi Chat dan Sosial Media), 78% melalui media konvensional (TV, Radio, Koran dst), 47% mengakui mendapatkan informasi melalui media luar ruang dan hanya 19% mendapatkan informasi dari media pertunjukan rakyat. Kedua terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media online dan televisi adalah media informasi yang paling dipercaya masyarakat.



Gambar 6. Tingkat Kepercayaan Terhadap Media

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat diperoleh hasil 75% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Detail skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut



Gambar 7. Skor Aspek Informasi Publik yang Didapat

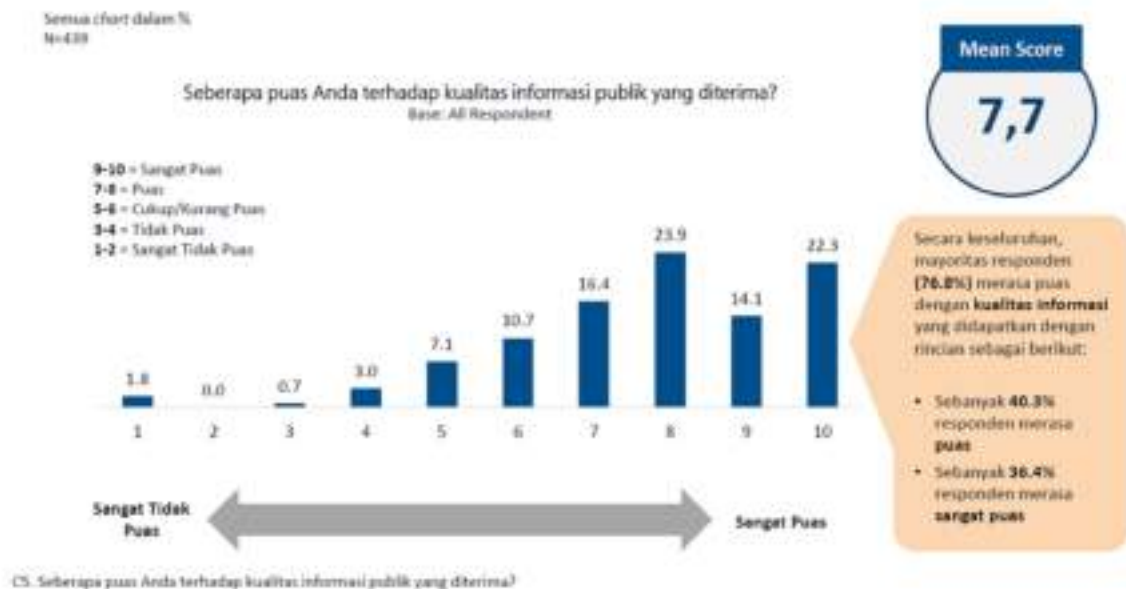


Gambar 8. Skor Kepuasan Terhadap Keakuratan Informasi

KEPUASAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI



Mayoritas responden telah merasa puas terhadap kualitas informasi yang didapatkan



Gambar 9. Skor Kepuasan Terhadap Kualitas nformasi

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP INFORMASI YANG DITERIMA



Mayoritas responden juga percaya terhadap informasi yang mereka dapatkan

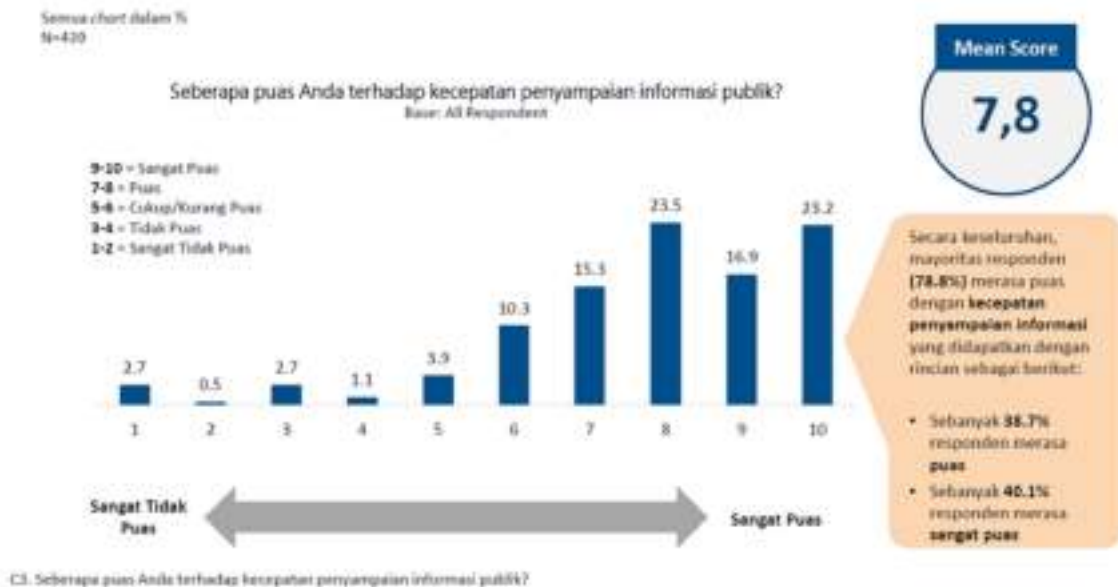


Gambar 10. Skor Kepercayaan Terhadap Informasi

KEPUASAN TERHADAP KECEPATAN PENYAMPAIAN INFORMASI



Mayoritas responden telah merasa puas terhadap kecepatan penyampaian informasi



Gambar 11. Skor Kecepatan Penyampaian Informasi

KEPUASAN TERHADAP AKSESIBILITAS INFORMASI



Mayoritas responden sudah merasa puas terhadap aksesibilitas informasi yang diterima



Gambar 12. Skor Aksesibilitas Informasi

No	Variabel	Skor (%)
Aspek Konten		
1	Kepuasan Terhadap Informasi yang Didapat	74,20%
2	Kepuasan Terhadap Keakuratan Informasi	72,40%
3	Kepuasan Terhadap Kualitas Informasi	76,80%
4	Tingkat Kepercayaan Terhadap Informasi yang Diterima	70,40%
Aspek Aksesibilitas		
5	Kepuasan Terhadap Kecepatan Penyampaian Informasi	78,80%
6	Kepuasan Terhadap Aksesibilitas Informasi	80,40%
Indeks: $(V1+V2+V3+V4+V5+V6): 6$		75,5

Tabel 8. Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional 2020

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	60%	69,43%	≥ 70%	75%	71%	75,5%

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 3 (tiga) tahun terakhir

Adanya tingkat kepuasan terhadap kualitas serta akses informasi terkait program prioritas pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer 2020 tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia berada di angka 75% atau sama dengan hasil tahun 2020.








TRUST IN GOVERNMENT INCREASES IN 15 OF 26 MARKETS

Percent trust in government



Gambar 13. Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah di Indonesia Tahun 2020
(Sumber: Edelman Trust Barometer 2020)

Secara umum seluruh target kinerja Ditjen IKP tahun 2020 dapat tercapai meskipun dari awal tahun anggaran berjalan terjadi pandemi COVID-19. Namun dengan berbagai upaya inovasi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seluruh target dapat tercapai dengan modifikasi platform media sosialisasi yang biasa digunakan. Seluruh capaian kinerja tahun 2020 Ditjen IKP dapat dilihat dalam matriks berikut:

Capaian Kinerja Eselon I Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik TA 2020					
No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2020	Capaian Kinerja	Presentase Capaian	Status
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%	80,4%	100	
2	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%	76,8%	100	
3	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah.	70% Jumlah Penduduk Usia Produktif (120 Juta Jiwa)	269.450.761 sebaran penduduk Indonesia	100	
4	1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP.	76,5 (skala)	Nilai Pengungkit Ditjen IKP pada Kemkominfo sebesar 13,23% atau sebesar 47,5% dari nilai maksimal komponen pengungkit yakni 36,4%	-	
5	2. Nilai Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen IKP.	67 (skala)	66,89%	99,84	
6	3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen IKP Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen.	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%	a. 5 dari 5 rekomendasi telah di tindak lanjuti b.	100	
7	4. Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen IKP Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen.	1 %	Terdapat TGR LK 2019 sebesar Rp.247.618.060 atau 0,0007 dari total realisasi anggaran TA 2019 sebesar Rp.335.060.092.112	100	

8	5. Nilai Persepsi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen IKP.	3,5 (Skala)	IKM Monpers : 3,18 IKM Muspen : 3, 62 Indeks Rerata: 3, 4	97,14%	
---	--	-------------	---	--------	---

Tabel 10. Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP

B. Capaian Unit Kerja Eselon II

1. Direktorat Tata Kelola Kemitraan Dan Komunikasi Publik

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, sebagai bagian dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi publik. Kinerjanya difokuskan kepada perwujudan tata kelola sistem komunikasi di Indonesia, pelaksanaan kebijakan komunikasi, dan peningkatan kompetensi lembaga maupun aparatur pelayanan komunikasi dan informasi.

Secara umum capaian kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik tahun 2020 dapat disimpulkan mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Terlaksananya Pengelolaan Komunikasi Publik di K/L/D sesuai Inpres 9 Tahun 2015.	Jumlah K/L yang Melakukan Penyebaran Informasi Narasi Tunggal.	50	Total K/L yang melakukan penyebaran Narasi Tunggal sejumlah 68 K/L dengan total 26 konten narasi tunggal	136
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional.	160	Terdapat 229 Pemerintah Daerah yang melakukan diseminasi melalui GPR Widget.	143
		Jumlah Dokumen Standardisasi Pengelolaan Komunikasi Publik.	7	1. 1 dokumen uji kompetensi JFPH 2. Dokumen grand design Komunikasi publik telah selesai namun kajian rancangan perpresnya belum terlaksana	100

				3. Dokumen Juknis Pengelolaan Hubungan Media 4. Dokumen Juknis Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik 5. Juknis Layanan Informasi Publik 6. Juknis Monitoring Isu dan Manajemen Krisis Tambahan Dokumen yang selesai di bulan Desember 7. Draft PM JFPH	
2	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang komunikasi di K/L/D.	Persentase (%) Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi yang Meningkat Kompetensinya.	40%	45 %	112
		Peningkatan (%) Kualitas Kinerja PPID.	40%	74%	185
		Persentase (%) Pemda yang Melaksanakan Sub Urusan IKP sesuai NSPK.	40%	Nilai Survey biro perencanaan dengan skala 0-3. Rerara Total nilai IKP adalah 2,0840 dikonversi dengan asumsi pembobotan persentase menjadi 40%	100
3	Peningkatan Kapasitas Mitra Komunikasi dalam Pengelolaan Komunikasi Publik.	Persentase (%) Meningkatnya Kapasitas Mitra Komunikasi Media dan Sosial dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	25%	44,5% Nilai yang diperoleh dari hasil survey yang diadakan ketika aktivitas webinar pada Penyuluh Informasi Publik, Satgas Medsos, dan Kelompok Informasi masyarakat.	178
4	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Komunikasi Publik.	Persentase (%) Peningkatan Akses Informasi Publik oleh Masyarakat Melalui PPID	50%	Nilai 39% diperoleh dari perhitungan permintaan akses informasi publik pada 4 kota yang menerima sosialisasi melalui webinar, yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Bali. dari empat lokasi tersebut diketahui bahwa hanya Provinsi NTB yang mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik di atas 50% yaitu 489%, provinsi Jawa Tengah hanya mengalami peningkatan sekitar 23%,	78
				sedangkan dua wilayah lainnya yaitu Kalimantan Timur dan Bali mengalami penurunan partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi publik	

Tabel 11. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2020

2. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan

Sebagai salah satu Unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Penetapan Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam untuk Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Ditjen IKP, Kementerian Kominfo. Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 mempunyai tugas adalah melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi politik, hukum dan keamanan.

Seluruh target dalam perjanjian kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam tahun anggaran 2020 mampu dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Tersebarannya Informasi Publik yang Berkualitas Melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Luar Ruang, Media Tatap Muka, Pertunjukan Rakyat dan Internet.	Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Elektronik.	5.000.000	91,017,617	1,820%
		Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Luar Ruang.	3.500.000	638,799,851	18,251 %
		Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Tatap Muka dan Petunra	1.500	3,147	209%
		Jumlah Jangkauan Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Internet.	10.500.000	27,683,915	263%

Tabel 12. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Polhukam Tahun 2020

Capaian Khusus:

Dukungan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di tengah pandemic COVID-19 yang masih berlangsung Indonesia berhasil melaksanakan Pilkada Serentak di 270 lokasi di seluruh Indonesia. Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemilihan Serentak 2020 merupakan instrumen demokrasi dan perubahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga menjadi penting maknanya bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal 201A ayat 2 Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Desember 2020. Dan berdasarkan pada Rapat tanggal 4 April 2020 antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Pemerintah dan DPR memutuskan pelaksanaan PEMILIHAN SERENTAK pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemilihan Serentak dapat disebut pula sebagai kontes politik, yang sewajarnya dipenuhi dengan berbagai strategi dan intrik politik. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan isu-isu SARA dalam kampanye, penyebaran disinformasi (hoaks), ujaran kebencian, hingga kampanye hitam kerap dilakukan oknum demi memenangkan kontes ini. Penggunaan cara-cara tersebut dapat menyebabkan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya di kalangan masyarakat, serta tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan.

Untuk mendukung terlaksananya penguatan karakter dan mental bangsa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILIHAN SERENTAK 2020, Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik akan melaksanakan Diseminasi Informasi Publik dengan tema Pemilihan Serentak 2020 yang bertujuan menjaga kepentingan nasional/national interest dalam bentuk mempertahankan ideologi dan persatuan/kesatuan bangsa; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2020, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mengikuti Pemilu dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil), aman Covid-19, dan menghindari politik uang (money politics).

Dukungan diseminasi Pilkada Serentak 2020 dilakukan melalui berbagai media dengan tetap meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bersifat mobilisasi dan pengerahan massa secara offline. Terlampir adalah capaian diseminasi Pilkada Serentak 2020 yang telah dilaksanakan oleh Ditjen IKP:

No	Aktivitas	Capaian
1.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui Televisi	<ul style="list-style-type: none"> • Total 6.276 spot dengan rincian : 3.141 spot pada 11 televisi nasional dan 3.135 spot pada 8 televisi lokal; • Net Reach mencapai 42,5 juta pemirsa
2.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui Radio	<ul style="list-style-type: none"> • Total 5.246 spot pada 11 Radio Jaringan Nasional dan 32 radio lokal • Net Reach mencapai 10,8 juta pendengar radio
3.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau Advertorial melalui Media Cetak	<ul style="list-style-type: none"> • Total 35 spot ILM/advertorial pada 6 media cetak nasional dan 10 media cetak lokal

		<ul style="list-style-type: none"> Akumulasi oplah sebanyak 2,8 juta dengan jangkauan 11,5 juta pembaca
4.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau Advertorial melalui Media Online	360 spot pada 10 media online nasional dan 10 media lokal dengan jangkauan 26 juta
5.	Penayangan Iklan melalui Media Luar Ruang	204 titik media luar ruang pada 18 provinsi dengan jangkauan sekitar 20,6 juta
6.	Webinar Bersama Kelompok Informasi Masyarakat dan Petugas Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Tiga (3) Kegiatan sosialisasi daring dengan konsep talkshow bersama KIM dan satu (1) kegiatan bersama PIP yang ditayangkan di Youtube Ditjen IKP, tema "Pemilihan Serentak 2020" dengan total peserta 820 orang dan 28.824 viewers.

Tabel 13. Capaian Dukungan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020

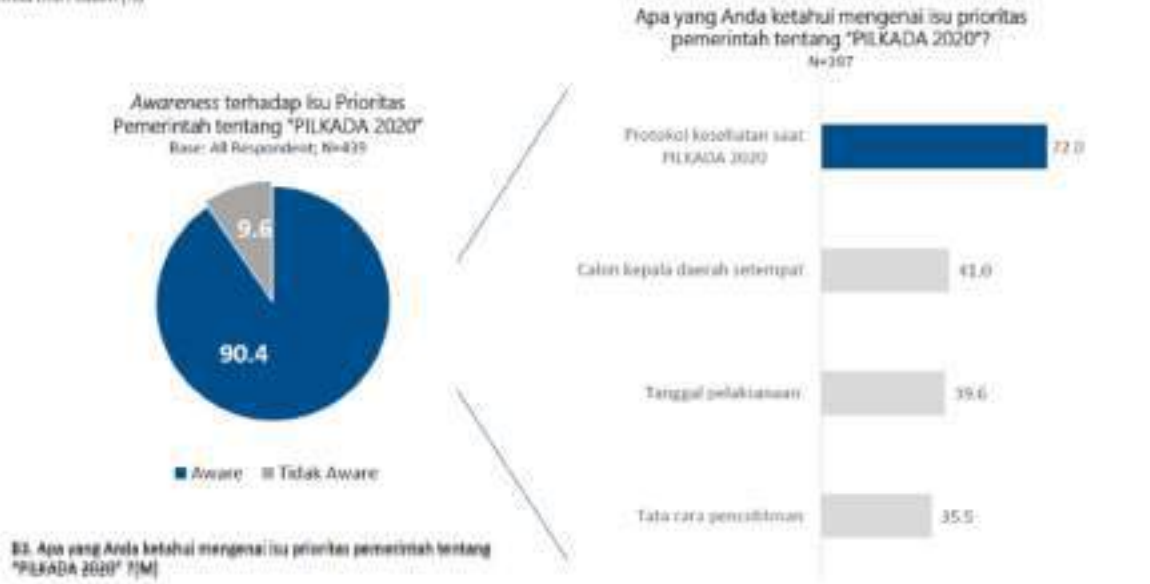
Dalam rangka evaluasi kinerja diseminasi informasi publik tahun 2020 telah dilaksanakan Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional Pada Masyarakat, dan khusus isu Pilkada Serentak tahun 2020 respon masyarakat tergolong positif. Berikut adalah hasil survey persepsi tersebut

PILKADA 2020



Mayoritas responden *aware* dan tahu tentang tanggal, tata cara dan protokol kesehatan saat PILKADA

Semua chart dalam (%)



KOMUNIKASI PEMERINTAH TERKAIT PILKADA 2020



Mayoritas responden menganggap bahwa pemerintah telah menyampaikan dengan baik perihal PILKADA 2020

Semua chart dalam (%)



Gambar 14. Survey Persepsi Terhadap Informasi Pilkada Serentak 2020

2. Penanganan Isu Papua dan Papua Barat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan instruksi untuk mengambil langkah-langkah terobosan, tepat, fokus serta terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tugas-tugas yang diberikan kepada Kementerian Kominfo antara lain:

1. mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah Pulau Papua baik daerah komersil maupun nonkomersil terutama pendukung KI, KEK, KSPN, dan SKPT;
2. meningkatkan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh Wilayah Pulau Papua, baik daerah komersil maupun nonkomersil;
3. membangun pola kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet;
4. mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicinel, pelayanan pendidikan berbasis digital/ e-learning, penguatan jaringan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelayanan publik di seluruh distrik (kecamatan);
5. memastikan pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring Timur di seluruh Wilayah Pulau Papua;
6. mengembangkan start-up digital kaum muda Papua;
7. meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terpadu, inovatif, intensif dan berkeadilan terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
8. bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kampung digital; dan
9. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024

Terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2020 tersebut antara lain:

No	Poin	Aktivitas
1.	Koordinasi dan Konsolidasi	Penyusunan program dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan Kementerian Bappenas
2.	Isu utama	Isu dan Agenda Setting <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian Pembangunan Papua dan Papua Barat ▪ Otonomi Khusus
3.	Target	Masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya manusia dan infrastruktur.
4.	Aktivitas Diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan Dialog Interaktif di LPP RRI Jayapura dan LPP TVRI Papua dengan tema Refleksi Perjalanan Otonomi Khusus bagi Papua; ▪ Kampanye Digital tema Pembangunan Papua; ▪ Pembuatan Advetorial Media Online di Papua dengan tema Pemilihan Serentak dan Otonomi Khusus Papua tanggal 14 November - 13 Desember 2020

Tabel 14. Capaian Dukungan Komunikasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim

Dalam rangka implementasi sasaran strategis organisasi, setiap tahunnya perencanaan strategis dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian kinerja tahunan. Dokumen tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak di capai dalam satu tahun dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode satu tahun ke depan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 mempunyai tugas adalah melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi perekonomian dan maritim.

Secara umum seluruh target kinerja tahun 2020 Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dapat tercapai. Adapun rincian capaian dari perjanjian kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Tersebar nya informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat dan internet	Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media cetak	3,6 juta	10,047,000	279%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media elektronik	30 juta	51,600,000	171
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media luar ruang	1 juta	35,500,000	
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat	13.500	26.800	198%
		Jumlah jangkauan informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media internet	5 juta	125,005,000	2,500%
		Jumlah keterlibatan masyarakat tentang informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media internet	1 juta	5,150,000	500%

Tabel 15. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Perekonomian dan Maritim Tahun 2020

4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IK PMK) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi.

Direktorat IK PMK memiliki satuan target yang dirumuskan berdasarkan proyeksi capaian di bidang produksi konten dan diseminasi informasi yang disesuaikan dengan kriteria keberhasilan yang telah menjadi kesepakatan bersama di tingkat Eselon I. Secara umum capaian Direktorat IK PMK di tahun anggaran 2019 dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	<i>Tersebarannya Informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat dan internet.</i>	Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui media cetak	1,5 Juta	129,605	8%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui media elektronik	5 Juta	4,916,021	98%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui media luar ruang	6 Juta	24,360,034	406%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat	1,000	4,118	412%
		<i>Jumlah Jangkauan Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Internet</i>	14.999.999	28,239,350	188%

		<i>(termasuk menysasar kalangan millennial).</i>			
		<i>Jumlah keterlibatan masyarakat tentang Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Internet (termasuk menysasar kalangan millennial).</i>	270.000	12,035,079	4.457%
2	Tersebar nya Informasi Publik yang Berkualitas untuk Mendorong Penurunan Prevalensi Stunting	Jumlah Sebaran informasi publik dan kebijakan pemerintah untuk mendukung penurunan prevalensi stunting	44,5 Juta	41,311,927	92%
		Jumlah keterlibatan masyarakat tentang informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui internet	500 ribu	1,404,397	280%

Tabel 16. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK PMK Tahun 2020

Capaian Khusus Komunikasi Publik Penanggulangan Pandemi COVID-19

Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga kini jumlahnya terus bertambah. Per 30 Juni 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Adapun angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun.

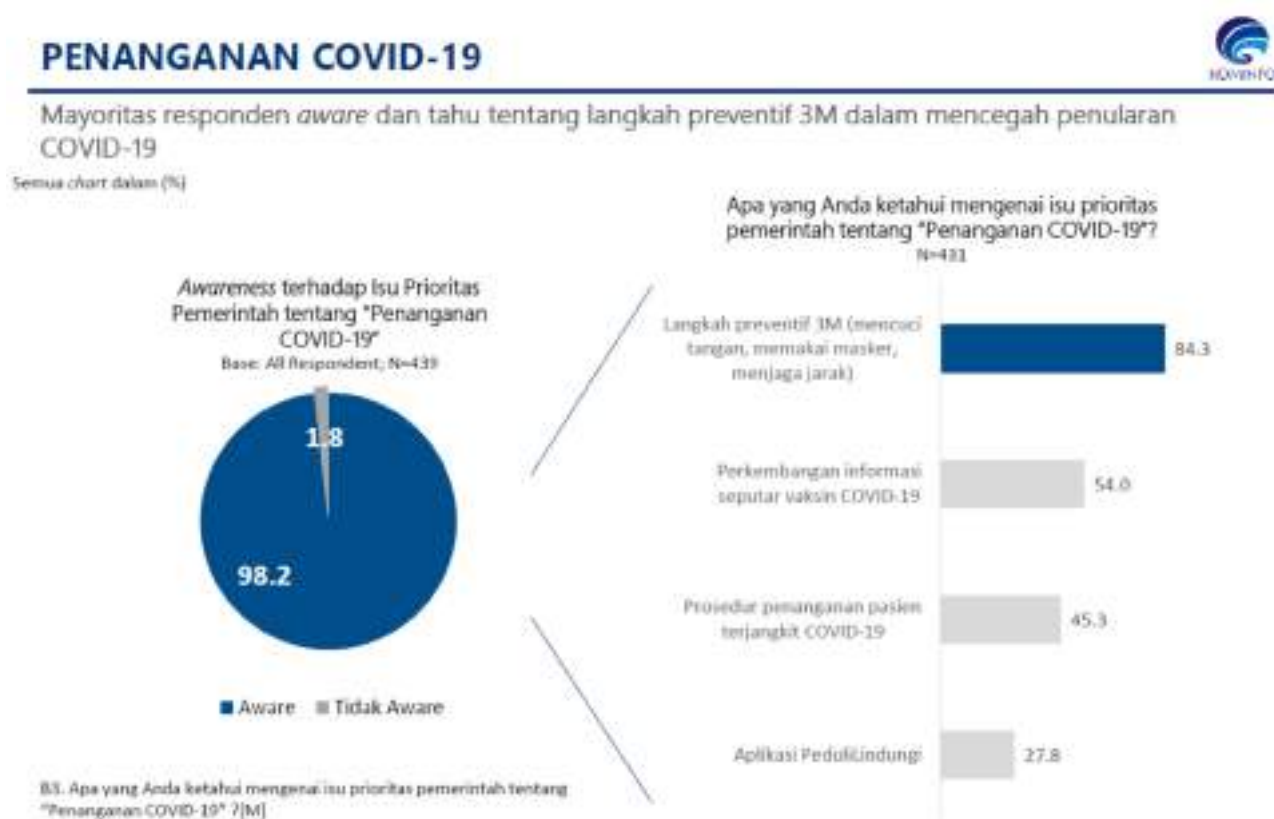
Secara umum, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah melakukan diseminasi informasi kepada publik tentang aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam rentang waktu Maret s.d Juli Ditjen IKP tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam rentang waktu tersebut Ditjen IKP telah melaksanakan komunikasi publik terkait penanganan pandemi COVID-19 dengan capaian sebagai berikut:

No	Media	Jumlah Konten	Jangkauan
1.	Media Sosial	1447 Konten	22.147.571
2.	Media Online	4245 Konten	53.847.330
3.	Media Elektronik (TV & Radio Jaringan Nasional)	79 Spot	13.714.974 pemirsa
4.	Webinar	13 Kali	2.600 peserta
5.	Livestream Forum Merdeka Barat 9	269 Kali	104.893.394 pemirsa

Tabel 17. Capaian Komunikasi Publik Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Sementara itu berdasarkan hasil survey persepsi publik tahun 2020, mayoritas masyarakat aware dan tahu tentang informasi-informasi terkait penanggulangan pandemi COVID-19 dibuktikan dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 15. Survey Persepsi Terhadap Informasi Penanganan Pandemi COVID-19

5. Direktorat Pengelolaan Media

Dalam mendukung capaian kinerja eselon 1 Direktorat Pengelolaan Media melakukan inovasi pola pendekatan diseminasi yang lebih efektif, efisien, dan massif sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, yaitu melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, dan media sosial.

Secara umum capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Media tahun anggaran 2020 dapat tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Tersebar nya Informasi publik yang berkualitas melalui media Pemerintah	Jumlah sebaran informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media Cetak Pemerintah	25.100.000	29,675,660	101%
		Jumlah sebaran informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media Online Pemerintah	9.000.000	13,519,232	130%
		Jumlah sebaran informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui Audio Visual Pemerintah	8.900.000	10,600,000	120%
		Jumlah sebaran informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui Media Sosial Pemerintah	10.000.000	33,010,320	330%

Tabel 18. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2020

5. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara kelembagaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik berperan penting dalam mendukung organisasi secara teknis dan administratif dalam hal administrasi keuangan, aset negara, kepegawaian, perencanaan, pengawasan kinerja, hukum dan kerjasama.

Dasar penetapan kinerja untuk Perjanjian Kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik ialah mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja eselon I di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Capaian Setditjen IKP mempunyai kontribusi langsung terhadap capaian kinerja dalam perjanjian kinerja eselon I yang menjadi amanat bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berfokus pada dukungan manajerial serta pemantauan internal organisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, berikut adalah capaian kinerja tahun anggaran 2019:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	<i>Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP Tahun 2020	76,5	36,4	47%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP Tahun 2020	67	66,8	97%

		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen IKP Tahun 2020	86	86	100%
		Level Maturitas Penerapan SPIP di Ditjen IKP Tahun 2020.	Level 3 (Skala 1- 5)	Nilai yang diperoleh dari hasil rivi u itjen terkait SPIP IKP 3,278	100%
		Presentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen IKP Tahun 2020 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	1 %	1%	100%
		Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Setditjen IKP Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK	a. Tahun Berjalan: 70% b. Tahun Sebelumnya : 30%	a. 100% b. 30%	100% 100%

Tabel 19. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen IKP Tahun 2020

Capaian Khusus

A. Reformasi Birokrasi

Simpulan hasil re vi u penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun Anggaran 2020 di Ditjen IKP pada komponen pengungkit menunjukan nilai 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) atau sebesar 91,82% (sembilan puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari nilai maksimal komponen pengungkit sebesar 23,5 (dua puluh tiga koma lima). Nilai tersebut adalah penilaian komponen pengungkit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai PMPRB
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,05
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,84
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,34
	Total Komponen Pengungkit	14,60	13,23

Tabel 20. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Komponen Pengungkit (Pemenuhan) 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai PMPRB
1.	Manajemen Perubahan	3,00	Masih diriviu
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	Masih diriviu
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	Masih diriviu
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	Masih diriviu
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	Masih diriviu
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	Masih diriviu
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	Masih diriviu
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	Masih diriviu
	Total Komponen Pengungkit	21,70	0,00

Tabel 21. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Komponen Pengungkit (Reform) 2020

B. Tingkat maturitas SPIP Ditjen IKP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian SPIP merupakan gabungan dari beberapa unsur yang, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pada tahun 2019, hasil penilaian SPIP di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan capaian pada tingkat level 3 atau “terdefinisi”. Tingkatan ini dapat diartikan bahwa karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum telah mampu menerapkan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Capaian tingkat implementasi pada level 3 merupakan ambang dari target nilai secara nasional yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Artinya secara kinerja Ditjen IKP sudah mampu memenuhi capaian yang telah ditetapkan dalam target capaian secara nasional. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung terhadap pencapaian ini secara umum adalah berjalannya sistem pengawasan terkait aspek pengendalian di setiap unsur satuan kerja.

No	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d 5)	Bobot	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3,75%	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3,75%	0,113
3	Kepemimpinan yang kondusif	3	3,75%	0,113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3,75%	0,150
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3,75%	0,113
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	3,75%	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4	3,75%	0,113
9	Identifikasi Risiko	3	10,00%	0,300
10	Analisis Risiko	3	10,00	0,300
11	Reviu Kinerja	3	2,27%	0,068
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2,27%	0,068
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	2,27%	0,068
14	Pengendalian Fisik atas Aset	3	2,27%	0,068
15	Penetapan dan Reviu Indikator	3	2,27%	0,068
16	Pemisahan Fungsi	3	2,27%	0,068
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	2,27%	0,068
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3	2,27%	0,068
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	2,27%	0,068
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	2,27%	0,068
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian	2	2,27%	0,045

	Interen (SPI) serta transaksi dan Kejadian Penting			
22	Informasi	3	5,00%	0,150
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3	5,00%	0,150
24	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,50%	0,225
25	Evaluasi Terpisah	3	7,50%	0,225
	Jumlah Skor	3,052		
	Tingkat Maturitas	TERDEFINISI		

Tabel 22. Matriks Penilaian SPIP oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo Tahun 2020

LAPORAN KINERJA

TAHUN



DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkup Eselon I Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Pencapaian di lingkup Eselon I tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja dilingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan.

No	Indikator Kinerja Sasaran Program Eselon I	Target 2020	Capaian Kinerja	Presentase Capaian
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%	80,4%	100
2	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	70%	76,8%	100



No	Indikator Kinerja Sasaran Program Kementerian	Target 2019	Capaian Kinerja	Presentase Capaian
1	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	71%	75.5%	100

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil survey persepsi, diseminasi informasi yang menargetkan masyarakat sebagai penerima informasi yang pasif dapat menggunakan media televisi, karena media ini masih dominan digunakan dan informasinya dipercaya oleh masyarakat;
2. Pada masa pandemi COVID-19 penggunaan media social sebagai sarana komunikasi menjadi semakin diandalkan. Dalam konteks komunikasi public, media sosial dapat digunakan sebagai media diseminasi kedua/pendamping yang menguatkan dan memperkaya konten informasi yang sudah disampaikan di media konvensional. Ditambah dengan rata-rata masyarakat Indonesia mengakses gadget mereka adalah 4 jam sehari dan temuan dalam survey rata-rata responden mengakses media untuk mendapatkan informasi selama 21 s.d 60 menit dalam sehari;
3. Untuk diseminasi informasi dengan output aksi masyarakat (contoh: penerapan protokol kesehatan) dapat menggunakan media komunikasi interpersonal seperti penyuluh atau petugas posyandu ditingkat RT/RW yang dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial dalam tempo waktu tertentu dengan mengelaborasi dengan isu-isu praktis di masing-masing daerah;
4. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah diinisiasi oleh Balitbang-SDM pada tahun 2020 tidak dilaksanakan terkait dengan kendala pandemi COVID-19. Namun kedepannya bisa ditetapkan secara resmi dan dilaksanakan untuk menjadi alat ukur keberhasilan dan benchmark pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara nasional.

Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021. Renstra Kemkominfo Tahun 2020—2024

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Edelman Trust Barometer 2020 Global Result:
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%202020/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_source=Website

Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional Pada Masyarakat Tahun 2020 – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik: <https://s.id/Bx6lo>

Lampiran Realisasi Anggaran Tahun 2020:

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	9.953.165.000	9.636.858.814	96,82%
2	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	15.188.137.000	14.979.869.715	98,63%
3	Direktorat Pengelolaan Media	18.245.885.000	17.533.288.231	96,09%
4	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	22.430.276.000	22.392.464.517	99,83%
5	Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan	92.612.122.000	89.420.728.340	96,55%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	90.303.725.000	87.429.401.335	96,82%
7	Monumen Pers Nasional Surakarta	11.000.000.000	10.208.616.066	92,81%
8	Museum Penerangan TMII	12.400.000.000	11.971.050.685	96,54%
JUMLAH		272.133.310.000	263.572.277.703	96,85%

LAPORAN KINERJA

TAHUN



DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA